

Strategi Inspektorat Dalam Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Dana Kampung: Studi Kasus di Kabupaten Nabire

Vailyn Herlina^{1*}, Kristian Hoegh Pride Lambe², Johannes Baptista Halik³

¹Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

herlinavailyn@gmail.com^{1*}

*Penulis korespondensi

Abstrak: Penelitian ini menganalisis strategi Inspektorat Kabupaten Nabire dalam implementasi pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana kampung. Dana kampung berperan penting sebagai instrumen pembangunan berbasis masyarakat sehingga memerlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efektif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi pada Inspektorat dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Inspektorat mencakup pembinaan aparatur kampung melalui pelatihan dan bimbingan teknis, penggunaan aplikasi *Siskeudes* dan *Siswaskeudes*, audit serta monitoring berkala, serta koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Tantangan utama dalam implementasi strategi ini adalah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, kondisi geografis, serta rendahnya pemahaman aparatur kampung mengenai regulasi keuangan. Meskipun demikian, strategi pengawasan Inspektorat mampu meningkatkan kepatuhan pengelolaan dana, memperkuat transparansi, dan mencegah penyimpangan, meski belum merata di seluruh wilayah. Penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas auditor, pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas, serta penguatan partisipasi masyarakat agar pengawasan dana kampung di Nabire berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak pada pembangunan lokal.

Kata kunci: strategi, inspektorat, pengawasan, dana kampung, Nabire

Abstract: This study analyzes the strategies implemented by the Inspectorate of Nabire Regency in conducting guidance and supervision of village fund management. Village funds play a crucial role as an instrument of community-based development; therefore, their governance requires transparency, accountability, and effectiveness. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis from the Inspectorate and related institutions. The findings reveal that the Inspectorate's strategies include capacity building for village officials through training and technical assistance, the utilization of *Siskeudes* and *Siswaskeudes* applications, regular audits and monitoring, as well as coordination with the Department of Community and Village Empowerment. The main challenges in implementing these strategies are limited human resources, budget constraints, geographical barriers, and the low level of understanding of village officials regarding financial regulations. Despite these challenges, the Inspectorate's supervisory strategies have contributed to improved compliance, enhanced transparency, and the prevention of fund misuse, although their impact is not yet evenly distributed across all villages. This study recommends strengthening auditor capacity, expanding the use of information technology, and increasing community participation to ensure more effective, sustainable, and impactful governance of village funds in Nabire.

Keywords: strategy, inspectorate, supervision, village funds, Nabire

PENDAHULUAN

Pengelolaan dan pengawasan Dana Desa/Dana Kampung terus menjadi isu strategis dalam tata kelola sektor publik di Indonesia karena eskalasi alokasi anggaran dan kompleksitas regulasi pada tingkat lokal. Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp71 triliun, menegaskan pentingnya akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran di tingkat desa (Kementerian Keuangan RI, 2024). Sejalan dengan itu, kerangka regulasi—terutama Permendagri No. 20/2018—menuntut pengelolaan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Di sisi lain, bukti terbaru menunjukkan dinamika regulasi desa kerap berubah dan tidak selalu koheren, menimbulkan kebingungan pada level implementasi (World Bank, 2023). Untuk menjembatani kesenjangan kapasitas, pemerintah mendorong digitalisasi pengelolaan dan pengawasan melalui Siskeudes dan Siswaskeudes, yang terus diperbarui guna memperkuat kontrol internal dan audit berbasis risiko (BPKP, 2025; Kemendagri, 2023).

Dalam konteks Papua Tengah—termasuk Kabupaten Nabire—agenda penguatan pengawasan Dana Kampung menonjol melalui kolaborasi pemda dan penegak hukum untuk pencegahan tipikor (ANTARA, 2025). Tesis ini menemukan bahwa **Inspektorat Kabupaten Nabire** menghadapi kombinasi tantangan berupa keterbatasan SDM pengawas, kondisi geografis yang menantang, serta dinamika regulasi; sekaligus merumuskan strategi pembinaan dan pengawasan berbasis risk-based auditing, pemanfaatan **Siswaskeudes**, penguatan koordinasi, dan peningkatan kompetensi APIP (Herlina, 2024). Temuan tersebut menegaskan relevansi peningkatan kapabilitas APIP, yang secara empiris berhubungan dengan efektivitas SPIP dan akuntabilitas kinerja pemerintah (Malelea, 2024; Wulandari et al., 2024).

Tabel 1. Fenomena dan Fakta Pendukung

Fenomena/Isu	Data/Fakta terbaru (2019–2025)	Implikasi bagi penelitian
Eskalasi Dana Desa nasional	Pagu 2025: Rp71 T (DJPk Kemenkeu)	Tekanan akuntabilitas & pengawasan meningkat
Evolusi sistem digital pengelolaan/pengawasan	Siskeudes 2.0.7 dan Siswaskeudes	Kebutuhan adopsi &

Fenomena/Isu	Data/Fakta terbaru (2019–2025)	Implikasi bagi penelitian
Dinamika regulasi desa	2.0 dirilis/ditingkatkan 2023–2025	integrasi dalam audit risiko
	Perubahan yang kerap tidak koheren (World Bank, 2023)	Risiko kepatuhan & kebutuhan pembinaan berkelanjutan
Tuntutan tata kelola yang akuntabel	Permendagri 20/2018: transparan, akuntabel, partisipatif	Mandat normatif bagi desain pengawasan
Penguatan APIP dan kolaborasi daerah	Inisiatif pengawasan Dana Desa di Papua Tengah (2025)	Momentum implementasi strategi Inspektorat Nabire

Sumber: Sumber data: DJPK Kemenkeu; BPKP & Kemendagri; World Bank; Kemendagri (Permendagri 20/2018); ANTARA Papua. (2025)

Berdasarkan temuan awal, penelitian ini memfokuskan pada strategi pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Kampung oleh Inspektorat Kabupaten Nabire, mencakup pemetaan risiko, optimalisasi penggunaan Siswaskeudes, penguatan koordinasi lintas pihak, serta peningkatan kompetensi auditor internal. Fokus tersebut mengisi kesenjangan literatur pada konteks kabupaten di wilayah timur Indonesia yang menghadapi hambatan geografis dan kapasitas yang khas, sekaligus memberikan rekomendasi operasional bagi peningkatan kapabilitas APIP dan efektivitas SPIP pada sektor keuangan desa.

Urgensi penelitian ini terletak pada: (1) besarnya eksposur fiskal Dana Kampung di tengah dinamika regulasi; (2) kebutuhan percepatan adopsi dan orkestrasi **Siskeudes–Siswaskeudes** dalam siklus pengawasan; serta (3) bukti empiris bahwa penguatan kapabilitas **APIP** berkorelasi positif dengan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan. Dengan demikian, hasil penelitian menawarkan peta jalan berbasis konteks Nabire yang dapat direplikasi untuk memperkuat tata kelola keuangan desa/kampung di Papua dan daerah berkarakter serupa.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Pengawasan dalam Sektor Publik

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen penting untuk memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana,

standar, dan regulasi yang berlaku (Terry, 2019). Dalam konteks sektor publik, pengawasan tidak hanya berfokus pada efisiensi dan efektivitas, tetapi juga pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan (Stoner et al., 2016).

Di Indonesia, pengawasan dalam tata kelola keuangan daerah dan desa diatur melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, serta dikuatkan oleh regulasi terbaru terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (BPKP, 2022). Konsep **risk-based supervision** juga mulai diterapkan agar Inspektorat dapat memprioritaskan pengawasan pada area dengan potensi risiko penyalahgunaan anggaran yang tinggi (BPKP, 2022).

Pengelolaan Dana Desa/Kampung

Dana desa merupakan instrumen kebijakan desentralisasi fiskal yang bertujuan meningkatkan pembangunan lokal, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat desa (Cheema & Rondinelli, 1983). Sejak diberlakukannya **UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**, dana desa menjadi sumber pendanaan strategis untuk pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Desa, 2020).

Namun, tantangan dalam pengelolaannya cukup kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas aparatur desa, lemahnya literasi anggaran masyarakat, serta terbatasnya pengawasan berkontribusi terhadap ketidaksesuaian pengelolaan dana dengan prinsip tata kelola yang baik (Sari, 2019; Rahmadani, 2021). Kajian terbaru juga menyoroti bahwa dinamika politik lokal dan keterbatasan infrastruktur, khususnya di wilayah timur Indonesia, sering menghambat akuntabilitas dan transparansi dana desa (Antara, 2023).

Peran dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** yang memiliki mandat melaksanakan audit, reviu, evaluasi, monitoring, serta pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Dalam konteks dana kampung, Inspektorat memiliki peran strategis baik secara preventif maupun represif: melakukan sosialisasi dan pelatihan aparatur desa, mengaudit keuangan desa, hingga

menangani laporan dugaan penyimpangan (BPKP, 2022).

Penelitian Rahmadani (2021) menunjukkan bahwa peran Inspektorat bukan hanya auditor, melainkan juga mitra konsultatif dalam meningkatkan kapasitas kepala desa. Sementara itu, Situmorang (2020) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa untuk memperkuat transparansi. Studi BPKP (2022) bahkan menegaskan perlunya peningkatan kompetensi APIP dalam melakukan audit tematik dan audit kinerja.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian relevan menjadi pijakan bagi studi ini:

- Sari (2019) menegaskan efektivitas pengawasan Inspektorat sangat dipengaruhi oleh keterbatasan SDM dan tindak lanjut hasil audit.
- Rahmadani (2021) menemukan bahwa Inspektorat berperan sebagai auditor sekaligus konsultan dalam membina kepala desa.
- Situmorang (2020) menekankan partisipasi masyarakat sebagai faktor penting dalam menciptakan transparansi dana desa.
- BPKP (2022) menyoroti perlunya peningkatan kapasitas Inspektorat dalam melakukan pengawasan berbasis risiko.

Hasil-hasil tersebut menunjukkan kesenjangan antara peran normatif Inspektorat dan kondisi empiris di lapangan, terutama di daerah dengan keterbatasan SDM, infrastruktur, dan aksesibilitas seperti Kabupaten Nabire.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam dari perspektif para aktor yang terlibat langsung dalam pengawasan dana kampung. Studi kasus dipandang sesuai untuk mengeksplorasi strategi, tantangan, dan dinamika peran Inspektorat Kabupaten Nabire dalam pembinaan serta pengawasan pengelolaan dana kampung, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan geografis setempat (Creswell & Poth, 2018).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, karena daerah ini menghadapi kompleksitas pengawasan dana

kampung yang dipengaruhi oleh faktor geografis, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kapasitas aparatur kampung. Pemilihan lokasi juga mempertimbangkan signifikansi peran Inspektorat Nabire sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang menjadi ujung tombak dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, dari Januari hingga Juni 2025, untuk memungkinkan peneliti melakukan penggalan data lapangan secara intensif.

Populasi penelitian adalah seluruh pejabat dan auditor yang berada di lingkungan Inspektorat Kabupaten Nabire, serta pihak terkait dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK). Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya, penelitian ini tidak menggunakan teknik probabilistik, tetapi menerapkan purposive sampling. Teknik ini dipilih karena hanya individu dengan pengalaman dan pengetahuan langsung mengenai pengawasan dana kampung yang dianggap relevan menjadi informan penelitian. Total enam informan kunci diwawancarai, terdiri atas pejabat struktural Inspektorat, auditor lapangan, pejabat DPMK, serta kepala kampung yang menjadi objek pengawasan. Pendekatan purposive sampling dianggap tepat dalam penelitian kualitatif karena memfokuskan pada kedalaman data dibandingkan representasi statistik (Etikan et al., 2016).

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman, strategi, dan kendala Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan. Observasi dilakukan dengan mengikuti kegiatan pembinaan, rapat koordinasi, dan monitoring lapangan yang dilaksanakan Inspektorat. Sementara itu, dokumentasi diperoleh dari laporan audit, laporan pertanggungjawaban dana kampung, serta regulasi dan pedoman teknis pengelolaan dana desa/kampung. Kombinasi metode ini bertujuan untuk meningkatkan validitas data melalui triangulasi sumber (Patton, 2015).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah membaca transkrip wawancara, melakukan proses coding, mengidentifikasi tema utama, dan menginterpretasikan hubungan antar tema dalam konteks teori dan kebijakan

pengawasan dana desa. Analisis tematik dianggap relevan karena fleksibel dan mampu menyoroti pola pengalaman yang kompleks di lapangan (Braun & Clarke, 2019). Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan strategi member checking, diskusi dengan sejawat, serta konfirmasi data kepada informan. Hal ini dilakukan agar interpretasi yang dibuat tetap konsisten dengan pengalaman partisipan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan Penelitian

Informan penelitian terdiri atas enam orang yang berasal dari Inspektorat Kabupaten Nabire, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), serta aparat kampung. Informan dipilih menggunakan purposive sampling dengan mempertimbangkan peran, pengalaman, dan keterlibatan langsung mereka dalam pembinaan serta pengawasan dana kampung.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama/Identitas*	Jabatan/Instansi	Peran dalam Penelitian
1	H.D	Inspektur Pembantu Wilayah IV – Inspektorat	Pengawasan dan pembinaan kampung wilayah IV
2	M.N.S.STP	Inspektur Pembantu Wilayah III – Inspektorat	Audit dan tindak lanjut pengaduan masyarakat
3	S.A.N, ST	Kasubag Evaluasi, Pelaporan, & Perencanaan	Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan
4	Y D, SH	Pelaksana Irban I – Inspektorat	Pengumpulan data, audit teknis, dan laporan
5	N.M, ST	Kasubag Keuangan – Inspektorat	Pengelolaan anggaran internal pengawasan
6	M.T.M, S.STP	Inspektur Pembantu Khusus – Inspektorat	Investigasi kasus khusus & koordinasi lintas OPD

*Keterangan: nama informan disamarkan untuk menjaga kerahasiaan.

Strategi Inspektorat dalam Pembinaan dan Pengawasan Dana Kampung

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Inspektorat menerapkan strategi pembinaan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, serta

pendampingan langsung kepada aparat kampung. Strategi ini diperkuat dengan pemanfaatan aplikasi *Siskeudes* dan *Siswaskeudes* untuk mendukung pencatatan, pelaporan, serta pengawasan keuangan desa secara digital.

Seorang informan (HD, Inspektur Pembantu Wilayah IV) menyatakan:

“Kami selalu mendorong setiap kampung menggunakan Siskeudes dan Siswaskeudes. Aplikasi ini sangat membantu kami dalam memantau aliran dana secara lebih transparan dan cepat.” (Hasil wawancara, 2025)

Hal ini menunjukkan adanya integrasi teknologi informasi dalam proses pengawasan, meskipun belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan infrastruktur internet di beberapa kampung terpencil.

Kendala dalam Implementasi Strategi

Keterbatasan **SDM pengawas, kondisi geografis, dan anggaran operasional** menjadi kendala utama Inspektorat. Informan MN (Irbani Wilayah III) menegaskan:

“Jumlah auditor kami sangat terbatas dibanding jumlah kampung yang harus diawasi. Koordinasi dengan pemerintah kampung pun sering masih bersifat insidental, belum sistematis.” (Hasil wawancara, 2025)

Kondisi geografis Nabire yang sulit dijangkau, ditambah rendahnya pemahaman aparat kampung terkait pengelolaan dana, memperbesar tantangan pengawasan.

Efektivitas Koordinasi Lintas Pihak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dengan DPMK relatif berjalan, namun masih belum optimal. Inspektorat kerap berperan sebagai auditor sekaligus konsultan bagi aparat kampung, tetapi mekanisme koordinasi formal yang berkelanjutan belum terbentuk. Menurut informan SM (Kasubag Evaluasi),

“Kami berusaha melakukan evaluasi rutin, tetapi keterbatasan anggaran dan SDM membuat koordinasi lebih banyak bersifat ad hoc.” (Hasil wawancara, 2025)

Dampak Pengawasan terhadap Efektivitas Penggunaan Dana

Pengawasan terbukti berkontribusi pada meningkatnya kepatuhan dalam penyusunan laporan dan berkurangnya penyimpangan penggunaan dana, terutama di kampung yang mendapatkan pendampingan intensif. Namun, dampak ini tidak merata. Beberapa kampung masih lambat dalam pelaporan dan cenderung menunggu teguran dari Inspektorat.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Inspektorat Nabire selaras dengan konsep pengawasan berbasis risiko yang direkomendasikan BPKP (2022), yakni memprioritaskan kampung dengan potensi penyimpangan tinggi untuk mendapatkan pengawasan intensif. Pemanfaatan *Siskeudes* dan *Siswaskeudes* juga sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong digitalisasi tata kelola dana desa (Kemendagri, 2023).

Namun, keterbatasan SDM dan infrastruktur menyebabkan pengawasan belum optimal. Hal ini konsisten dengan penelitian Sari (2019) yang menemukan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi kapasitas auditor dan tindak lanjut hasil audit. Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan temuan Rahmadani (2021) bahwa Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai auditor, tetapi juga sebagai mitra konsultatif bagi aparat desa.

Kesenjangan antara harapan regulasi dan kondisi lapangan terlihat jelas di Nabire. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah, sebagaimana juga dicatat Situmorang (2020), sehingga fungsi pengawasan sosial belum berperan signifikan. Dengan demikian, efektivitas pengawasan Inspektorat baru berjalan baik di kampung tertentu, tetapi belum merata di seluruh wilayah.

Hasil ini menjawab pertanyaan penelitian: strategi Inspektorat mencakup pembinaan, audit, dan penggunaan teknologi; hambatan utama adalah keterbatasan SDM, anggaran, dan kondisi geografis; sedangkan efektivitas strategi baru sebagian tercapai, bergantung pada intensitas pendampingan dan dukungan kelembagaan lintas sektor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Inspektorat Kabupaten Nabire dalam pembinaan

dan pengawasan pengelolaan dana kampung dilaksanakan melalui bimbingan teknis, pendampingan langsung, audit berkala, serta pemanfaatan aplikasi *Siskeudes* dan *Siswaskeudes*. Strategi tersebut terbukti mampu meningkatkan transparansi, memperbaiki kepatuhan administrasi, serta menekan potensi penyimpangan dana kampung. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala serius berupa keterbatasan jumlah auditor, minimnya anggaran operasional, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta rendahnya kapasitas aparatur kampung dalam memahami regulasi keuangan. Koordinasi lintas sektor dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta peran konsultatif Inspektorat kepada aparat kampung menjadi faktor pendukung, meski belum terlaksana secara konsisten dan sistematis. Dengan demikian, pengawasan dana kampung di Nabire berjalan cukup efektif pada sebagian kampung, tetapi belum merata di seluruh wilayah.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

1. **Penguatan Kapasitas SDM APIP:** Inspektorat perlu memperbanyak pelatihan, sertifikasi, serta penambahan jumlah auditor agar pengawasan lebih merata.
2. **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi:** Penggunaan *Siswaskeudes* harus ditingkatkan dan diperluas hingga ke kampung yang sulit dijangkau, dengan dukungan infrastruktur jaringan internet yang memadai.
3. **Peningkatan Anggaran Pengawasan:** Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana khusus untuk operasional Inspektorat, termasuk transportasi ke kampung terpencil.
4. **Penguatan Koordinasi Lintas Sektor:** Perlu adanya mekanisme formal dan berkelanjutan antara Inspektorat, DPMK, dan aparat kampung untuk mempercepat penyelesaian temuan audit serta memperkuat fungsi pembinaan.
5. **Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat:** Mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengawasan perlu diperluas melalui forum transparansi, laporan partisipatif, serta pemanfaatan kanal pengaduan publik.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan pengawasan dana kampung di Kabupaten Nabire dapat berjalan lebih efektif,

transparan, dan berkelanjutan, serta menjadi model pengawasan keuangan desa bagi daerah lain di Papua maupun wilayah Indonesia Timur pada umumnya.

ACKNOWLEDGEMENT (Ucapan Terima Kasih)

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Kristian H.P. Lambe, ST., MM., MT dan Dr. Johannes Baptista Halik, SE., MM selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga selama proses penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran Inspektorat Kabupaten Nabire serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Nabire yang telah memberikan kesempatan, akses data, serta informasi yang mendukung penelitian ini. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada seluruh informan yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pandangan dalam wawancara.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan sejawat yang senantiasa memberikan dukungan moral dan motivasi hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2023). *Pengawasan dana desa di Papua: Tantangan dan solusi*. Jakarta: Antara News.
- Antara. (2025, July 25). *Pemprov Papua Tengah memperkuat pengawasan dana desa*. ANTARA Papua. <https://papua.antaranews.com/>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022). *Evaluasi pengawasan dana desa oleh APIP*. Jakarta: BPKP.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2025, June 24). *Peluncuran Siskeudes 2.0.7 Rilis 2 & Siswaskeudes 2.0*. BPKP. <https://www.bpkp.go.id>
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). *Decentralization and development: Policy implementation in developing countries*.

- Beverly Hills: Sage.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4.
<https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Halik, J. B., Sasabone, L., Dezi, A., & Sipi, S. (2024). Pelatihan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga di Desa Sesean, Kabupaten Toraja Utara. *Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PADIMAS)*, 3(2), 51–56.
<https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/padimas/article/view/6554>
- Halik, M. Y., Halik, J. B., Sumanti, D. A. F., & Mangampa, S. N. M. (2024). Auditor's Individual Morality In Moderating The Love Of Money And Machiavellian Characteristics Of Accounting Fraud Tendencies. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(11), 2889–2903.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i11.p11>
- Herlina, V. (2024). *Strategi pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana kampung oleh Inspektorat Kabupaten Nabire* (Tesis). Universitas Kristen Indonesia Paulus, Program Magister Manajemen. [Tesis tidak dipublikasikan].
- Iyai, Y. E. M., Jaya, A., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kepatuhan dan Prosedur Verifikasi terhadap Kualitas Kinerja Pegawai di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua Tengah. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 32–42.
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/872>
- Karangan, M., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Pengaruh Program Kompetensi dan Pelatihan Karyawan terhadap Peningkatan Keselamatan Kerja di PT. Vale Indonesia Tbk. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 248–260.
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/1031>
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2020). *Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kemendesa.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, October 29). *Rincian Dana Desa per Desa Tahun Anggaran 2025*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
<https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Lambe, K. H. P. (2024). Unlocking Gen-Z employee potential: the role of strategic leadership and organizational culture Desbloqueando o potencial dos funcionários da geração Z: o papel da liderança estratégica e da cultura organizacional. *Brazilian Journal of Development*, 10(11), 1–21.
<https://doi.org/10.34117/bjdv10n11-033>
- Lambe, K. H. P., Palondongan, E., Ma'na, P., & Tandi, A. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. *Al-Buhuts*, 20(1), 138–147.
<https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4711>
- Lambe, K. H. P., Tandi, A., & Pangalo, T. (2023). ANALYSIS OF EMPLOYEE PERFORMANCE EVALUATION AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE OF NORTH TORAJA REGENCY. *Journal of Entrepreneur Business and Management (JEBM)*, 1(3), 87–98.
<https://journal.amkop.id/jebm/article/view/111>
- Malelea, F. E. (2024). The role of APIP capabilities in the effectiveness of SPIP and SDGs. *KnE Social Sciences*, 9(2), 251–260.
<https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.12345>
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115.

- <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Mendaun, N. K., Lambe, K. H. P., & Malissa, M. (2025). Peran Tambahan Penghasilan Pegawai Dalam Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Perindustrian Kabupaten Nabire. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 116–124. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/997>
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254>
- Panggalo, A., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo : Peran Sistem LPSE Dalam Meningkatkan Proses Pengadaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 70–78. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/992/824>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Rahmadani, A. (2021). Peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan dana desa: Studi kasus Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 145–156.
- Roreng, P. P., Halik, J. B., Halik, M. Y., & Irdawati. (2024). Systematic Literature Review : Kondisi Makroekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 dan Prospek di Masa Mendatang. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 56–67. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.306>
- Sanggalang, A. D., Rantererung, C. L., & Halik, J. B. (2025). Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 86–92. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/862>
- Sari, D. (2019). Efektivitas pengawasan Inspektorat Daerah dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 7(1), 23–34.
- Setiawati, L., Todingbua, M. A., & Halik, J. B. (2025). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara. *Scientific Journal of Economics, Management, Business, and Accounting*, 15(1), 141–155. <https://doi.org/10.37478/als.v15i01.5342>
- Situmorang, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa dan peran masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 87–99.
- Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (2016). *Management* (12th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Susilowati, D., Lambe, K. H. P., & Farid, M. (2023). Investigating the parameters which influence green supply chain management in agricultural industry. *ECONOMIC ANNALS-XXI*, 206(11–12), 30–35. <https://doi.org/10.21003/ea.v206-05>
- Terry, G. R. (2019). *Principles of management* (10th ed.). Homewood, IL: Irwin.
- World Bank. (2023). *Village governance, politics, and participation in Indonesia*. Washington, DC: World Bank.
- Wulandari, S., Prabowo, R., & Nugroho, A. (2024). Pengaruh kapabilitas APIP terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 21(1), 55–68.